

SKRIPSI

**IMPLIKASI PERUBAHAN SYARAT PENGGUNAAN DISKRESI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

*Diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**Diajukan Oleh :
HAMDIKO SATRIO
191001211159**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAMDIKO SATRIO

NPM : 1910012111159

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) Skripsi dengan judul :

**IMPLIKASI PERUBAHAN SYARAT PENGGUNAAN DISKRESI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA
KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Seminar Hasil/Komprehensif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal) bebas dari unsur yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "Penjiplakan Karya Ilmiah (Plagiat)"

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan diatas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani, dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Padang, Agustus 2023

HAMDIKO SATRIO

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

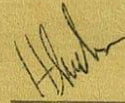
No. Reg: 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : HAMDIKO SATRIO
NPM : 1910012111159
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Perubahan Syarat Penggunaan Diskresi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

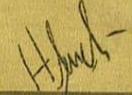


PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 04/Skripsi/HTN/FH/VIII-2023

Nama : **HAMDIKO SATRIO**
NPM : **1910012111159**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implikasi Perubahan Syarat Penggunaan Diskresi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Rabu** Tanggal **Enam Belas Bulan Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Nurbeti, S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Prafiimaratri, S.H., M.Hum)

**IMPLIKASI PERUBAHAN SYARAT PENGGUNAAN DISKRESI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Hamdiko Satrio¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: hdikosatrio831@gmail.com

ABSTRAK

Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan. Pengertian mengenai diskresi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? (2) Bagaimana Implikasi perubahan syarat penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan Teknik pengumpulan data studi dokumen, jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan Primer, Sekunder, Tersier. Berdasarkan hasil kajian diatas penelitian menyimpulkan, Pertama Pengaturan Diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah di atur dalam pasal 75 angka 2 yang menghilangkan syarat penggunaan diskresi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang sebelumnya di atur oleh Undang-Undang administrasi negara. Kedua, Implikasi perubahan syarat penggunaan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah mempengaruhi keputusan pemerintah, berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Diskresi, Implikasi, Undang-Undang, Administrasi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Allhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan skripsi ini yang mengangkat judul **“IMPLIKASI PERUBAHAN SYARAT PENGGUNAAN DISKRESI BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”** Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan perspektif penulis dalam memaknai sesuatu. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Bapak Helmi Chandra Sy,S.H., M.H, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Penulis yang telah banyak memberikan nasehat, bantuan, bimbingan dan arahan agar penulisan skripsi ini dapat segera terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag., M.H,
5. Penguji I : Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Penguji II : Ibu Nurbeti S.H., M.H, yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan penulis ilmu dan pembelajaran.
7. Seluruh Tenaga Pendidik di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sangat banyak membantu selama proses penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

8. Kepada keluarga tercinta Eko Dadi (Papa), Desmawati (Mama), Dhifaulia Berliana (Adik), Muhammad Ibnu (Adik) atas curahan kasih sayang dan doa, nasehat, semangat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2019, khususnya bagian Hukum Tata Negara yang telah berjuang bersama-sama, saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain dalam menyelesaikan pendidikan di Universitas Bung Hatta.
10. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Padang, Agustus 2023

Penulis

Hamdiko Satrio

NPM:1910012111159

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Metode Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindakan dan Instrumen Pemerintahan	8
1. Pengertian Tindakan atau Perbuatan Pemerintahan	8
2. Instrumen Pemerintahan.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Diskresi (<i>freies ermessen</i>).....	14
1. Pengertian Diskresi.....	14
2. Kedudukan Diskresi dalam Negara Hukum.....	18
C. Tinjauan tentang Diskresi Dari Undang-Undang.....	21
1. Diskresi Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan.....	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	29
B. Implikasi Perubahan Syarat Diskresi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan50
B. Saran51

DAFTAR PUSTAKA

